



## Analisis Swot Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu

### Wot Analysis Of The Environmental Agency Of Bengkulu City In Waste Management In Bengkulu City

Fadillah Oktanindya <sup>1)</sup>; Evi Lorita <sup>2)</sup>; Antonio Imanda <sup>3)</sup>  
<sup>123)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu  
Email: <sup>1)</sup> [fadillahoktanindya@gmail.com](mailto:fadillahoktanindya@gmail.com)

#### How to Cite :

Oktanindya. F., Lorita. E., Imanda. A. (2025). Analisis Swot Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu. Jurnal Multidisiplin. 2(2).

#### ARTICLE HISTORY

Received [27 Oktober 2025]  
Revised [01 Desember 2025]  
Accepted [03 Desember 2025]

#### KEYWORDS

SWOT Analysis, Waste Management, Environmental Agency, Bengkulu City

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH memiliki kekuatan berupa regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, serta program inovatif seperti bank sampah dan kegiatan gotong royong. Namun, kelemahan masih terlihat pada keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Dari sisi peluang, partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan sektor swasta memberikan dukungan positif. Adapun ancaman meliputi pertumbuhan volume sampah yang terus meningkat dan kurangnya fasilitas pengolahan modern. Analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan adalah memaksimalkan potensi kolaborasi masyarakat dengan dukungan regulasi yang ada, meningkatkan sosialisasi dan edukasi lingkungan, serta memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah agar tercapai pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) in waste management conducted by the Environmental Agency (DLH) of Bengkulu City. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings reveal that DLH's strengths lie in clear regulations, strong support from the local government, and innovative programs such as waste banks and community clean-up activities. However, weaknesses include limited funding, low public awareness, and insufficient use of technology. Opportunities are seen in community participation and collaboration with the private sector, while threats involve the continuously increasing volume of waste and the lack of modern processing facilities. The SWOT analysis indicates that strategies should focus on maximizing community collaboration supported by existing regulations, enhancing environmental education and outreach, and strengthening waste management infrastructure to achieve more effective and sustainable practices...*

## PENDAHULUAN

Isu pengelolaan sampah saat ini telah berkembang menjadi salah satu tantangan serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat berkontribusi langsung terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Bank Dunia (2018) melaporkan bahwa secara global produksi sampah kota telah mencapai lebih dari 2 miliar ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050 apabila tidak ada strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Kondisi tersebut tidak

hanya memunculkan persoalan teknis dalam penanganan limbah, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan pembangunan kota (World Bank, 2018). Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, menghadapi tantangan yang tidak kalah signifikan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah setiap tahun, dengan komposisi terbesar berasal dari sampah rumah tangga. Sampah organik menempati porsi lebih dari 50% dari total timbunan, diikuti oleh plastik, kertas, logam, dan material lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus ditempatkan sebagai isu prioritas dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat, sampah sebenarnya memiliki potensi ekonomi dan dapat mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) (KLHK, 2022).

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga dihadapkan pada persoalan sampah yang kompleks. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman di wilayah Provinsi Bengkulu, kota ini menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap harinya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu (2023), volume sampah harian mencapai ratusan ton dengan titik-titik kritis di kawasan pasar tradisional, pusat kota, serta daerah pemukiman padat. Tantangan semakin besar karena keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jumlah armada pengangkutan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta teknologi pengolahan modern yang belum memadai. Di sisi lain, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sebuah survei lokal oleh Universitas Bengkulu (2023) menemukan bahwa sekitar 40% masyarakat kota masih melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas pemilahan, dan lemahnya penegakan regulasi di lapangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan berbasis pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah. Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur teknis pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi hambatan di tingkat daerah, termasuk Kota Bengkulu (Kementerian Lingkungan Hidup, 2019).

Dalam konteks tersebut, DLH Kota Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program bank sampah, gerakan gotong royong lingkungan, hingga kampanye edukasi pemilahan sampah merupakan beberapa strategi yang telah dijalankan (DLH Kota Bengkulu, 2024). Meski demikian, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa efektivitas program masih terbatas. Partisipasi masyarakat cenderung tidak konsisten, program tidak merata di semua wilayah, dan faktor pendukung seperti anggaran serta teknologi masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif untuk memahami sejauh mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi DLH dalam mengelola sampah. Analisis SWOT menjadi pendekatan yang relevan untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Melalui SWOT, dapat diidentifikasi faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Kekuatan yang dimiliki misalnya berupa dukungan regulasi dan program inovatif, sementara kelemahannya antara lain minimnya sarana pendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dari sisi eksternal, peluang berupa meningkatnya kesadaran lingkungan global dan potensi kerja sama dengan sektor swasta dapat dimanfaatkan, sedangkan ancaman berupa pertumbuhan volume sampah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan harus diantisipasi (Rangkuti, 2016).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya DLH Kota Bengkulu, dalam memperkuat tata kelola lingkungan. Tanpa strategi yang tepat, persoalan sampah akan terus menjadi beban dan berpotensi menimbulkan krisis lingkungan di masa mendatang. Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademik mengenai tata kelola lingkungan di daerah perkotaan Indonesia, yang masih relatif terbatas. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, dan (2) strategi apa yang dapat diterapkan oleh DLH Kota Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan analisis SWOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan sampah serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek. Pertama, manfaat akademis berupa kontribusi dalam memperkaya kajian tentang analisis SWOT dalam konteks tata kelola lingkungan perkotaan di Indonesia. Kedua, manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya DLH Kota Bengkulu, dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi



pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kota Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Manajemen Lingkungan**

Manajemen lingkungan merupakan konsep yang menekankan pada upaya mengendalikan, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam secara terencana agar tercapai keberlanjutan ekosistem. Menurut Barrow (2006), manajemen lingkungan melibatkan proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan yang berfokus pada upaya mencegah kerusakan dan mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap alam. Dalam konteks pengelolaan sampah, manajemen lingkungan menuntut adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menyelesaikan persoalan limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi sirkular. Konsep ini relevan diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan tata kelola lingkungan, khususnya terkait pengendalian sampah perkotaan.

### **Teori Administrasi Publik**

Administrasi publik menitikberatkan pada efektivitas lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003), paradigma *New Public Service* menegaskan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani warga negara, bukan sekadar menyarakan mereka. Hal ini berarti kebijakan pengelolaan sampah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada efisiensi internal birokrasi. Osborne dan Gaebler (1992) menambahkan bahwa inovasi menjadi faktor kunci dalam reformasi administrasi publik, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan. Perspektif administrasi publik ini penting digunakan untuk menilai sejauh mana DLH Kota Bengkulu mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang responsif, akuntabel, serta partisipatif.

### **Teori SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

Analisis SWOT merupakan alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal organisasi. Rangkuti (2016) menjelaskan bahwa SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang bersumber dari internal organisasi, serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Keunggulan analisis SWOT terletak pada kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi organisasi dalam menghadapi tantangan, sehingga strategi yang disusun lebih adaptif. Dalam pengelolaan sampah, SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi DLH Kota Bengkulu, seperti regulasi yang kuat dan dukungan pemerintah daerah, sekaligus menyoroti hambatan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis ini juga mampu membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, sekaligus memperingatkan adanya ancaman seperti peningkatan volume sampah dan keterbatasan infrastruktur.

### **Teori Pengelolaan Sampah Berkelanjutan**

Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekankan pada prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) serta *circular economy*. Menurut Tchobanoglous et al. (2002), pengelolaan sampah modern tidak lagi hanya menekankan pada aktivitas kumpul, angkut, dan buang, tetapi juga mencakup strategi pengurangan sampah dari sumbernya serta pemanfaatan kembali material. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengharuskan pemerintah daerah beralih pada paradigma baru dalam menangani persoalan limbah. Bagi Kota Bengkulu, penerapan konsep ini berarti DLH harus mengembangkan sistem yang tidak hanya mengandalkan TPA, tetapi juga memperkuat bank sampah, unit daur ulang, serta edukasi masyarakat agar mampu memilah sampah sejak dari rumah tangga.

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menekankan bahwa partisipasi warga tidak boleh bersifat simbolis, melainkan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi nyata dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi dapat diwujudkan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian Fitriani (2020) menunjukkan bahwa program bank sampah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat

bukan hanya mendukung efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan.

### Teori Good Governance

Prinsip *good governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi dalam setiap aspek pemerintahan. UNDP (1997) menyatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, penerapan *good governance* berarti DLH Kota Bengkulu harus mampu menyediakan sistem yang transparan dalam alokasi anggaran, akuntabel dalam pelaksanaan program, efektif dalam mengurangi volume sampah, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini akan menentukan sejauh mana pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada terciptanya kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menafsirkan fenomena sosial dari perspektif informan dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam pengelolaan sampah (Creswell, 2014; Bogdan & Taylor, 1992). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di DLH Kota Bengkulu sebagai instansi yang berwenang langsung dalam pengelolaan persampahan. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri atas pejabat struktural, staf teknis, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Jumlah informan disesuaikan hingga mencapai titik jenuh (saturation point), yaitu ketika data yang diperoleh tidak lagi menghasilkan informasi baru (Sugiyono, 2018). Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari laporan resmi, regulasi daerah, serta dokumen kebijakan terkait. Yin (2014) menekankan bahwa kombinasi data primer dan sekunder memperkuat validitas penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Denzin, 1978) serta member check kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja DLH Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis berbasis analisis SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian ini menggambarkan secara mendalam bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu menjalankan tugasnya dalam mengelola sampah serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerjanya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen resmi. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.

Temuan pertama berkaitan dengan **kekuatan internal** DLH. Regulasi yang jelas menjadi salah satu fondasi utama. Kota Bengkulu memiliki aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang menjadi pedoman teknis. Kehadiran regulasi ini memberi legitimasi pada program pengelolaan sampah di daerah. Selain itu, dukungan pemerintah kota dalam bentuk kebijakan anggaran dan integrasi program lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah juga termasuk kekuatan signifikan. DLH juga telah meluncurkan sejumlah program inovatif, seperti bank sampah yang memberi insentif ekonomi kepada masyarakat serta kegiatan gotong royong lingkungan yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebersihan kota. Program kampanye edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dan komunitas turut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kesadaran.

Namun, kekuatan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai **kelemahan internal**. Kendala terbesar adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor persampahan. Anggaran yang terbatas berakibat pada keterbatasan armada pengangkut sampah, peralatan operasional, serta fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memenuhi standar sanitary landfill. Jumlah tenaga



teknis juga terbatas, sebagian besar belum mendapat pelatihan memadai mengenai pengolahan sampah modern. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa staf lapangan belum memahami standar teknis pemilahan dan daur ulang, sehingga pengelolaan cenderung masih berfokus pada pola kumpul-angkut-buang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah menjadi hambatan serius. Observasi lapangan memperlihatkan masih banyak warga yang mencampur sampah organik dan anorganik karena minimnya fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga. Lemahnya penegakan aturan juga membuat masyarakat tidak memiliki insentif maupun sanksi yang jelas dalam mengubah perilaku.

Faktor eksternal memperlihatkan adanya **peluang** yang cukup besar. Masyarakat Kota Bengkulu menunjukkan antusiasme untuk terlibat dalam program berbasis komunitas, terutama melalui bank sampah dan kegiatan lingkungan sekolah. Partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran lingkungan di sebagian kelompok masyarakat, meskipun belum merata. Sektor swasta juga mulai menunjukkan kepedulian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah, misalnya penyediaan tempat sampah terpilah atau dukungan alat kebersihan. Selain itu, kebijakan nasional yang mendorong penerapan ekonomi sirkular membuka peluang integrasi antara pengelolaan sampah dengan kegiatan ekonomi produktif. Kolaborasi ini dapat meningkatkan daya guna sampah, khususnya plastik dan organik, yang memiliki potensi daur ulang tinggi.

Di sisi lain, DLH menghadapi ancaman eksternal yang cukup serius. Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi kota menyebabkan volume sampah terus bertambah dari tahun ke tahun. Data DLH menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah harian mencapai ratusan ton dan jumlah tersebut meningkat setiap kali musim libur atau saat ada kegiatan besar di kota. Keterbatasan fasilitas pengolahan modern memperburuk situasi, karena sebagian besar sampah hanya ditimbun di TPA tanpa proses pemrosesan yang ramah lingkungan. Kondisi ini menimbulkan risiko pencemaran tanah, air, dan udara di sekitar lokasi TPA. Ancaman lain berasal dari rendahnya literasi digital masyarakat, yang berimplikasi pada sulitnya penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi. Hal ini berpotensi menghambat program pengelolaan berbasis aplikasi atau sistem monitoring digital yang tengah dikembangkan.

Analisis SWOT secara keseluruhan memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan hambatan yang dihadapi. Regulasi, dukungan pemerintah, serta partisipasi komunitas menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan, namun kelemahan berupa keterbatasan dana, sarana, dan sumber daya manusia perlu segera diatasi. Peluang berupa dukungan kebijakan nasional dan kerja sama swasta memberi ruang untuk pengembangan inovasi, tetapi ancaman berupa volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan teknologi pengolahan menuntut strategi yang lebih adaptif.

Strategi yang dapat disusun berdasarkan hasil penelitian antara lain: memaksimalkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta; meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya pemilahan sampah; serta memperkuat infrastruktur dan teknologi pengolahan, termasuk penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* dan *circular economy*. Pengembangan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel juga diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memantau kinerja pengelolaan sampah.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun DLH Kota Bengkulu telah memiliki fondasi kelembagaan yang memadai, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang kompleks. Keberhasilan program ke depan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga ini mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Apabila strategi berbasis SWOT dapat diimplementasikan secara konsisten, pengelolaan sampah di Kota Bengkulu tidak hanya akan menjadi lebih efektif, tetapi juga berkontribusi terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu menunjukkan bahwa lembaga ini telah memiliki sejumlah kekuatan, namun masih menghadapi berbagai kelemahan internal yang signifikan. Analisis SWOT memperlihatkan bagaimana kekuatan berupa regulasi dan dukungan pemerintah daerah dapat menjadi modal strategis, sementara keterbatasan anggaran, sarana, dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Ketika dikaitkan dengan teori manajemen lingkungan, kondisi ini sejalan dengan pandangan Barrow (2006) bahwa keberhasilan manajemen lingkungan menuntut keseimbangan antara kebijakan, sumber daya, dan implementasi teknis. Regulasi yang jelas memberi dasar hukum, tetapi tanpa dukungan anggaran dan kapasitas teknis, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Dari perspektif administrasi publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma *New Public Service* sebagaimana dikemukakan Denhardt dan Denhardt (2003) belum sepenuhnya tercermin dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Pelayanan

publik seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun rendahnya kesadaran warga terhadap pemilahan sampah memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih terbatas. Kondisi ini sesuai dengan teori Osborne dan Gaebler (1992) yang menekankan pentingnya inovasi dalam reformasi pelayanan publik. Tanpa inovasi dalam sosialisasi dan sistem insentif, partisipasi masyarakat akan sulit ditingkatkan.

Analisis SWOT dalam penelitian ini memberikan gambaran yang konsisten dengan konsep yang dijelaskan oleh Rangkuti (2016). Kekuatan berupa regulasi, program inovatif, dan dukungan pemerintah perlu dipadukan dengan peluang eksternal seperti kebijakan ekonomi sirkular dan dukungan sektor swasta. Namun, kelemahan seperti keterbatasan dana serta ancaman berupa pertumbuhan volume sampah menuntut strategi adaptif agar organisasi mampu bertahan. Strategi SO (strength-opportunity) seperti memperluas program bank sampah dengan dukungan swasta dapat menjadi langkah konkret. Sementara itu, strategi WO (weakness-opportunity) dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pelatihan yang dibiayai oleh program CSR. Hasil penelitian juga menegaskan relevansi teori pengelolaan sampah berkelanjutan yang dikemukakan Tchobanoglous et al. (2002). Fakta bahwa Kota Bengkulu masih berfokus pada sistem kumpul-angkut-buang menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Upaya pengembangan bank sampah dan pemanfaatan limbah organik baru mencakup sebagian kecil dari potensi yang ada. Agar sesuai dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), DLH perlu mendorong sistem pemilahan di rumah tangga dan memperkuat fasilitas daur ulang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menekankan pengurangan sampah dari sumber.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation*, masih berada pada tingkat partisipasi simbolis, di mana masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan sporadis seperti gotong royong atau program insidental. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat mulai terlibat dalam program bank sampah, tetapi skala keterlibatannya belum merata. Temuan ini mendukung penelitian Fitriani (2020) yang menunjukkan bahwa program bank sampah efektif meningkatkan kesadaran apabila didukung edukasi yang intensif. Peningkatan partisipasi yang lebih bermakna dapat dilakukan melalui mekanisme insentif, regulasi yang konsisten, serta dukungan fasilitas pemilahan.

Dari sudut pandang *good governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan. Alokasi anggaran pengelolaan sampah belum dipublikasikan secara terbuka, sementara mekanisme pengawasan masih lemah. UNDP (1997) menekankan bahwa prinsip *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Fakta bahwa pengawasan masih bersifat reaktif, baru dilakukan setelah ada keluhan masyarakat, memperlihatkan bahwa sistem pengendalian belum memenuhi prinsip efektivitas dan akuntabilitas. Agar sesuai dengan prinsip *good governance*, DLH perlu memperkuat sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam mengawasi. Keterkaitan hasil penelitian dengan teori manajemen lingkungan juga memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif sangat diperlukan. Barrow (2006) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dalam temuan penelitian bahwa keterlibatan swasta melalui CSR menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan. Kolaborasi ini dapat mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas program.

Secara umum, pembahasan menunjukkan bahwa DLH Kota Bengkulu berada pada posisi strategis untuk mengembangkan pengelolaan sampah yang lebih baik, namun keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan lembaga ini memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal sambil mengatasi kelemahan serta mengantisipasi ancaman. Temuan ini mendukung kerangka teori SWOT yang menekankan pentingnya penyusunan strategi adaptif berdasarkan kondisi nyata organisasi. Strategi integratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling memengaruhi efektivitas manajemen persampahan. Kekuatan utama terletak pada keberadaan regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, serta program inovatif seperti bank sampah dan kegiatan gotong royong lingkungan. Namun, kelemahan yang menonjol mencakup keterbatasan



anggaran, minimnya fasilitas pengangkutan dan pengolahan sampah modern, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Dari sisi eksternal, peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi meningkatnya partisipasi masyarakat, dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, serta adanya kebijakan nasional yang mendorong penerapan ekonomi sirkular. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi mencakup pertumbuhan volume sampah yang terus meningkat, risiko pencemaran lingkungan akibat keterbatasan pengolahan, dan rendahnya literasi digital masyarakat yang dapat menghambat penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah.

Analisis SWOT memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu perlu diarahkan pada upaya memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengurangi kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Strategi tersebut mencakup peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta; penguatan edukasi serta sosialisasi berkelanjutan; serta pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah memiliki dasar kelembagaan yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan program ke depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas internal, memanfaatkan peluang eksternal, serta menerapkan prinsip manajemen lingkungan dan *good governance* secara konsisten. Apabila strategi berbasis SWOT dapat diimplementasikan dengan baik, maka pengelolaan sampah di Kota Bengkulu berpotensi berkembang lebih efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan.

### Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih menghadapi sejumlah kendala meskipun telah memiliki kekuatan kelembagaan. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan agar strategi pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor persampahan. Dukungan dana yang memadai sangat penting agar program seperti penambahan armada pengangkut, perbaikan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengembangan teknologi pengolahan modern dapat segera terealisasi. Investasi pada infrastruktur harus dipandang sebagai prioritas karena pengelolaan yang lemah akan berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sumber daya manusia di DLH juga perlu mendapat perhatian serius. Pelatihan teknis dan manajerial bagi staf, terutama petugas lapangan, harus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki kompetensi dalam menjalankan sistem pengelolaan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan ekonomi sirkular. Selain itu, rekrutmen tenaga teknis tambahan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan memperkuat pengawasan internal. Dari sisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah harus lebih intensif. Program bank sampah dan kegiatan berbasis komunitas dapat diperluas ke seluruh wilayah kota agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Insentif ekonomi dan penghargaan lingkungan dapat digunakan sebagai strategi untuk mendorong keterlibatan aktif warga.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan swasta dalam penyediaan fasilitas, pendanaan, maupun inovasi teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan yang dihadapi pemerintah. Kolaborasi ini harus dilandasi prinsip *good governance*, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan, misalnya melalui pengembangan aplikasi pelaporan sampah, sistem monitoring digital, atau integrasi data persampahan dengan program pembangunan daerah. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengendalian, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Untuk mendukungnya, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye dan pelatihan sederhana agar sistem berbasis teknologi dapat digunakan secara luas.

Melalui langkah-langkah tersebut, pengelolaan sampah di Kota Bengkulu berpotensi berkembang menjadi lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan peluang kolaborasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Barrow, C. J. (2006). *Environmental management for sustainable development* (2nd ed.). London: Routledge.
- Bogdan, R., & Taylor, S. (1992). *Introduction to qualitative research methods*. New York: Wiley.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. Boston: McGraw-Hill.
- Fitriani, R. (2020). Peran bank sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat perkotaan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 8(2), 101–112.
- KLHK. (2022). *Statistik persampahan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Spradley, J. P. (1997). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (2002). *Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage